

# ANALISIS STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH

Veronika Boleng Kelen, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Indonesia

\*Corresponding Author:  
Veronika Boleng Kelen

---

## Abstract.

*The aim of this research is to examine the East Flores Regency government's strategy in increasing Original Regional Income and developing and providing action plans and methods for regional development. This research is descriptive research that uses a qualitative approach and uses qualitative data analysis techniques with the SWOT analysis tool (Strength, Weakness, Opportunity, Threat Analysis). In order to realize all regional development plans, a regional budget is needed which is contained in the Regional Revenue and Expenditure Budget one of the sources of which is Regional Original Income. Target East Flores district government for a percentage portion of PAD to Total Regional Income of 7% at the end of the 2017-2022 development period. However, the government has not been able to achieve this target and this is coupled with the global disaster of the Covid-19 pandemic which has had an impact on the community's economy. The regional independence ratio in the 2017-2022 period never exceeded 5% and continues to decline to 4.25% in 2022 or falls into the very low category. This condition shows that development financing in East Flores Regency still depends on income transfers from the Central Government and East Nusa Tenggara Province. The government implemented the strategy through the Original Regional Income Increase Movement or GEMPAR by launching the Host to Host Application with the Land Office with the rural and urban property tax Intensification pattern. The level of financial independence in East Flores Regency is largely determined by the government's capacity to maximize potential and explore new income streams. Strategies to increase Original Regional Income and analytical research are needed to increase the level of regional financial independence.*

*Keywords: Government Strategy; Locally-generated revenue; Regional development*

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan Indonesia adalah sebuah proses humanisasi. Namun dalam perjalanan perkembangan bangsa ditemukan beberapa kesulitan yang rumit dan beragam. Pembangunan merupakan tugas yang sulit bagi Indonesia, negara yang terdiri dari 38 provinsi dengan potensi sumber daya dan kondisi topografi yang berbeda-beda. Meskipun demikian, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan. Untuk menjamin keberhasilan pembangunan secara keseluruhan, pemerintah dan DPR harus terus berupaya membangun kebijakan nasional. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan otonomi daerah dalam rangka memperlancar kesejahteraan pembangunan daerah. Perubahan terakhir terhadap undang-undang ini dilakukan dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Alhusain, at.al, 2017:1-2).

Pentingnya memperhatikan sumber pendapatan daerah, teknologi, struktur organisasi pemerintah daerah, dukungan hukum, perilaku masyarakat, dan aspek kepemimpinan agar pelaksanaan tugas otonom dapat berjalan dengan baik. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan otonomi daerah adalah: pertama, faktor manusia yang diterapkan dengan baik, kedua, unsur organisasi dan manajerial yang kuat; ketiga, fitur peralatan yang memadai dan berkualitas tinggi. Artinya perlu adanya kemandirian sektor keuangan, mengingat pertimbangan keuangan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya. Ketika desentralisasi fiskal diterapkan kemudian yang terjadi

khususnya daerah kabupaten justru banyak bergantung pada pemerintah pusat, karena terbatasnya jumlah dana yang berkaitan dengan sumber dana yang telah diatur oleh pemerintah pusat (Sasmito, Laka, Yulita & Gunawan, 2020: 85).

Pemerintah Kabupaten dan Kota harus lebih meningkatkan investasi daerah guna memaksimalkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota. Hal ini antara lain dapat dicapai dengan mendorong perluasan UMKM di sektor industri. Beberapa contohnya adalah perbaikan infrastruktur, penciptaan produk-produk baru, dan penetapan undang-undang yang mendorong perluasan usaha sehingga meningkatkan PAD kabupaten/kota (Sasmito, Laka, Yulita & Gunawan, 2020: 89).

Sebelum dilakukan modifikasi karena wabah Covid-19, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyajikan statistik APBD tahun 2020 yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota hanya memberikan kontribusi sekitar 26,49% terhadap pendapatan daerah. Dengan rata-rata kontribusi PAD sebesar 12,81% terhadap keseluruhan pendapatan daerah, kabupaten mempunyai porsi terendah. Pajak daerah menyumbang 71,64% PAD di daerah sehingga menjadi sumber utama. Bagi sebagian besar daerah, tantangannya adalah bagaimana mengatasi relatif kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dan masih bergantungnya daerah pada Dana Transfer Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah (Walid, 2022:4-5).

Pemerintah daerah diperkirakan akan lebih mandiri dalam bidang keuangan melalui desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Dengan demikian, faktor utama yang mempengaruhi kinerja keuangan suatu daerah adalah PAD yang merupakan salah satu komponen pendapatan daerah. Meneliti rasio PAD terhadap total pendapatan daerah dalam APBD merupakan salah satu cara yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan keuangan daerah saat ini. Identya adalah semakin sedikit suatu daerah bergantung pada pusat, maka semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD. Penting untuk diingat bahwa meningkatkan PAD tidak mengharuskan daerah bersaing untuk mengenakan pajak tambahan; sebaliknya, hal ini hanya memerlukan upaya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kemampuan regional yang ada. (Sasmito, Laka, Yulita & Gunawan, 2020: 110).

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur dan menjadi isu strategis adalah terkait dengan belum optimalnya kualitas pengelolaan pendapatan daerah dan rendahnya penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Untuk menjawab semua permasalahan tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Sanga & Jaeng, 2022).

Tingkat kemandirian finansial di kabupaten Flores Timur sangat ditentukan oleh kapasitas pemerintah dalam memaksimalkan potensi dan menyelidiki aliran pendapatan baru. Diperlukan metode dan rencana aksi yang tepat untuk mengembangkan PAD sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Strategi peningkatan PAD dan penelitian analitis diperlukan untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana PAD mengembangkan dan memberikan rencana tindakan serta metode untuk meningkatkan PAD. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang judul “Analisis Strategi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Menunjang Pembangunan Daerah”. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kolaborasi strategi penetapan kebijakan dari Amir Ma’aruf yang meliputi *pertama*, penentuan tujuan berkaitan dengan apa yang akan dilakukan pemerintah kedepan. *Kedua*, pengumpulan data dari informasi wawancara dan

dokumen. *Ketiga*, analisis data dengan menggunakan analisis SWOT dan *keempat*, penetapan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan teori implementasi kebijakan Goerge Edward III dalam mengkaji model strategi dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Flores Timur, tepatnya di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Penentuan informan penelitian ini, peneliti menentukan beberapa narasumber atau informan yang dianggap lebih paham tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Teknik yang digunakan oleh peneliti adalah Teknik *Purposive Sampling*. Karena dengan pertimbangan informan sumber data dalam penelitian ini oleh peneliti dianggap lebih paham dengan konteks penelitian (Sugiyono, 2021:94). Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT. Penggunaan teknik analisis matrik SWOT karena merupakan tahap awal dalam menemukan isu strategis yang nantinya digunakan bagi penemuan strategi pengembangan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Flores Timur. Selanjutnya untuk menjamin keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi yang baik adalah strategi yang disusun berdasarkan analisis terhadap data yang didapat dari pengamatan dan pengalaman. Dengan demikian, untuk menetapkan sebuah kebijakan strategis menurut Amir Ma'aruf yang mengemukakan setidaknya melalui empat (4) tahapan antara lain penetapan tujuan, pengumpulan data, analisis data dan penetapan kebijakan kemudian disesuaikan dengan teori model implementasi dari George Edward III yang menjelaskan 4 indikator yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

### 1. Penetapan Tujuan

Sebuah tujuan harus ditetapkan agar semua kegiatan yang direncanakan memiliki arah yang jelas dan tidak gamang. Penetapan tujuan dibuat sejasas dan sekonkrit mungkin, tidak abstrak dan multitafsir. Tujuan yang jelas dan konkrit akan membantu menetapkan data apa yang dibutuhkan, dari sumber mana dikumpulkan, alat analisis apa yang digunakan dan kebijakan seperti apa yang dibutuhkan. Kaitannya dengan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*polcy implemmentors*) (Widodo, 2018:97).

Di Kabupaten Flores Timur sendiri, para pelaksana kebijakan yang dimaksud adalah seluruh jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga pihak yang berkepentingan lainnya seperti pelaku usaha dan para investor perusahaan yang ada di Flores Timur. Pemerintah melalui Bappelitbangda dan Bappeda sebelum menetapkan tujuan dan strategi kebijakan yang dilakukan terlebih dahulu melakukan forum musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) daerah untuk menampung aspirasi serta usulan dari tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten. Dengan melibatkan semua elemen masyarakat. Hasil musyawarah tersebut kemudian ditetapkan menjadi tujuan kebijakan yang akan dilakukan bersama. Agar transformasi informasi ini dengan jelas tersampaikan maka langkah selanjutnya pemerintah melalui Bappelitbangda dan Bappeda mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.

Hasil observasi di lapangan diperoleh informasi bahwa langkah ini telah berjalan karena dalam proses perencanaan strategis yang berlaku di instansi pemerintah proses penyusunan rencana strategis juga telah dilalui sesuai tata cara yang berlaku di lingkungan organisasi pemerintah, yaitu dengan mekanisme dua arah, yaitu *Bottom Up dan Top Down*. Dari bawah

(*bottom up*) dimaksudkan untuk menampung kebutuhan dari bawah sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Setelah proses musyawarah di tingkat desa dan kecamatan, maka pemerintah daerah di tingkat kabupaten melakukan rapat koordinasi dengan semua kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk meninjau kembali aspirasi atau usulan dari masyarakat desa yang masuk dalam program prioritas dan rencana strategis pemerintah.

Peneliti menyaksikan dan mengikuti langsung dalam proses rapat kordinasi para kepala OPD dalam peninjauan kembali usulan masyarakat yang akan masuk dalam rencana strategis dan program prioritas pemerintah kedepan. Diketahui bahwa penyusunan RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dilakukan dengan pendekatan teknokratik yakni pendekatan perencanaan dengan menggunakan metode, asumsi dan kerangka berpikir untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu juga, penyusunan RPD senantiasa mengedepankan keterlibatan berbagai pihak (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) sebagai upaya mengintegrasikan sumber daya Daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu aktual yang dihadapi.

## Gambar 5.2 Proses Musrenbang di Kecamatan Adonara Timur dan Adonara Barat.



Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Penulis, 2024. .

## 2. Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, data yang dikumpulkan baik data kualitatif maupun kuantitatif. Data bisa dikumpulkan dengan berbagai cara yang sesuai seperti angket atau kuesioner, wawancara, pengamatan, curah pendapat atau dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan data kuantitatif berupa dokumentasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2017-2022.

Gambaran kondisi keuangan daerah kabupaten Flores Timur dalam periode pembangunan daerah jangka menengah persentase porsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 7% pada akhir periode RPJMD Tahun 2017-2022. Namun pemerintah kabupaten Flores Timur belum bisa mencapai target tersebut dan ditambah dengan adanya musibah global pandemi covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat. Untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dapat dilakukan dengan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 tahun.

Analisis keuangan daerah dilihat dari rasio kemandirian daerah Kabupaten Flores Timur pada periode 2017 – 2022 tidak pernah melebihi 5%. Rasio kemandirian daerah tertinggi pada tahun 2019 sebesar 5,47% dan terus menurun menjadi 4,25% pada tahun 2022 atau masuk pada

katagori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap alokasi Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi NTT masih sangat tinggi. Untuk meningkatkan kemandirian daerah kedepannya, Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu melakukan strategi untuk meningkatkan PAD. Gambaran tentang kemandirian Kabupaten Flores Timur tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 5.4 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022.**

| Tahun | Total Pendapatan     | Total PAD      | Rasio Kemandirian Daerah |
|-------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 2017  | 1.073.818.028.195,86 | 57.525.204.746 | 5,36                     |
| 2018  | 1.088.637.883.098,40 | 55.589.470.428 | 5,11                     |
| 2019  | 1.117.694.572.728,84 | 61.167.156.405 | 5,47                     |
| 2020  | 1.091.833.806.147,80 | 52.535.561.927 | 4,81                     |
| 2021  | 1.040.434.161.768,76 | 45.217.979.342 | 4,35                     |
| 2022* | 1.106.220.970.565,00 | 47.055.616.608 | 4,25                     |

*Sumber: Hasil analisis BKAD Kabupaten Flores Timur, 2022, Diolah Oleh Penyusun.*

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan menemukan data riil pajak daerah Kabupaten Flores Timur tidak terdaftar dan terdata, yang ada hanya data wajib pajak Hotel, Restoran dan Reklame bila kita telusuri setiap hotel dan restoran serta toko-toko baik di pasar maupun dipinggir jalan memiliki papan nama (reklame) tetapi semuanya tidak terdata. Inilah manfaatnya komputerisasi pendapatan asli daerah, keakurasian dan kelengkapan data akan terjamin disamping sangat efektif cukup dengan mengetik NPWPD data WPD akan terkafer dengan jelas.

### 3. Analisis Data

Alat yang digunakan adalah analisis SWOT dengan menggunakan keempat kelompok data tersebut. SWOT yang merupakan singkatan dari *Strength* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunity* (peluang) dan *Threat* (tantangan).

#### 1. *Strength* (Kekuatan)

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kekuatan internal dari kedua lembaga ini yaitu adanya potensi sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan dan pemanfaatan system aplikasi di bidang pengelolaan pendapatan daerah seperti Simda Keuangan, Simda Pendapatan Daerah, Simda Barang Milik Daerah, Simda Gaji, Sismiop untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dikarenakan manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan.

Diklat prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan peran sebagai pelayan masyarakat. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal melalui kegiatan prajabatan sampai dengan tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5 Jumlah Diklat Prajabatan bagi CPNSD Periode 2017-2021.**

| No           | Jenis DiklatPim  | Jumlah per Tahun |           |           |          |          | Total     |
|--------------|------------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
|              |                  | 2017             | 2018      | 2019      | 2020     | 2021     |           |
| 1            | Diklat PimTk.II  | 4                | 2         | 0         | 3        | 0        | 9         |
| 2            | Diklat PimTk.III | 12               | 22        | 15        | 0        | 6        | 54        |
| 3            | Diklat PimTk. IV | 4                | 10        | 0         | 0        | 0        | 14        |
| <b>Total</b> |                  | <b>20</b>        | <b>34</b> | <b>15</b> | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>77</b> |

Sumber: Badan Kepegawain dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Flores Timur, 2022.

## 2. Weakness (Kelemahan)

Masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan melekat serta penerapan SPIP; dengan beban dan volume pekerjaan yang cukup tinggi menyebabkan pengawasan melekat serta penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di lingkungan BAPENDA Kabupaten Flores Timur belum mendapat perhatian yang memadai.

Persoalan lain yang ditemukan adalah kurangnya jumlah personil dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang pembatasan jumlah staf fungsional dan pemberhentian pegawai honorer. Jadi beban kerja semakin bertambah, bahkan kita juga sering lembur untuk mengejar target.

## 3. Opportunity (Peluang)

Mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dari dalam internal organisasi salah satunya adalah adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Misi Reformasi Birokrasi, termasuk pada aspek tatalaksana dengan mendorong pemanfaatan *E-Government*. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Gunawan (2015:83) menjelaskan bahwa pengembangan *E-Government* merupakan Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 aktivitas yang berkaitan yaitu: a) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis, b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

## 4. Threat (Tantangan)

Tantangan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan keinginan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi dan memerlukan usaha yang lebih keras. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebagian besar informan menyatakan paham dengan faktor eksternal yang bisa menjadi peluang maupun ancaman dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Maka upaya digitalisasi dalam penginputan dan pengumutan pajak diterapkan. Hal ini dilakukan karena banyak masyarakat yang tidak membayar pajak karena kurangnya sumber daya manusia dalam menagih. Meskipun sudah didukung oleh teknologi yang canggih, masih ditemui masyarakat yang belum melek teknologi atau tidak dapat mengoperasikan *handphone* untuk membayar pajak secara online.

## 4 Penetapan Kebijakan

Langkah terakhir adalah penetapan kebijakan yang dipilih dari beberapa opsi kebijakan yang ditemukan berdasarkan kepada hasil analisis. Hasil analisis merupakan opsi terbaik yang direkomendasikan berdasarkan kisi-kisi yang sudah ditetapkan sebelumnya di saat perumusan



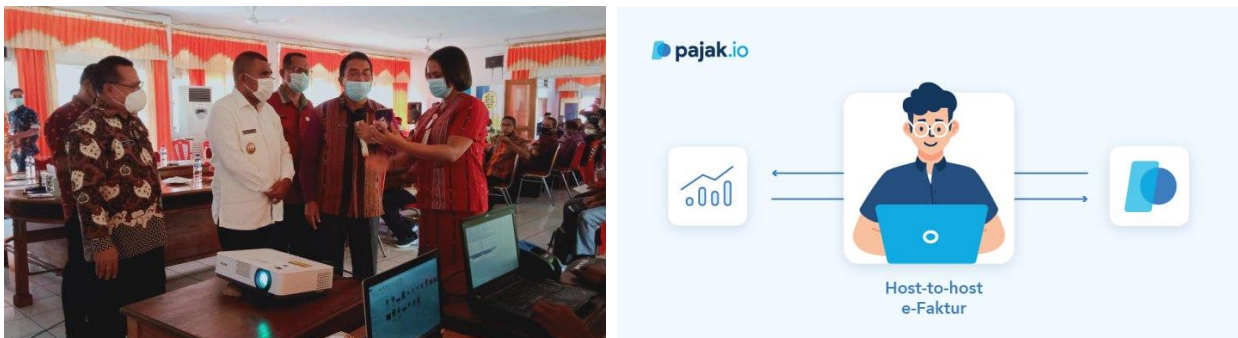
dan pendefinisian tujuan. Hasil analisis Lingkungan Startegis telah menghasilkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang merupakan faktor input untuk menganalisis strategi.

Langkah strategis yang pernah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Gempar Flotim atau Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur”. Langkah ini merupakan gerakan inovasi nyata yang dilaksanakan pada tahun 2021 sesuai dengan amanat undang-undang dan kewenangan dari otonomi daerah serta desentralisasi fiskal dan pelanchingan aplikasi pemungutan pajak *Host to Host* dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, selain itu juga dilakukan Pendataan data obyek PBB P2 yang sampai saat ini belum terdata dengan penyebaran dan pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang baru.

Ditemukan juga bahwa dukungan anggaran untuk kegiatan pendataan ini sangat terbatas maka kegiatan ini diprioriskankan di kota Larantuka. Selanjutnya berdasarkan luas tanah yang ada dilakukan perhitungan dan penetapan PBB dengan menerbitkan SPPT susulan. Dengan penetapan dan pencetakan SPPT susulan ini sekaligus mengkoreksi DHKP pada desa atau Kelurahan dimaksud.

## Gambar 5.8. Proses Peluncuran Aplikasi Host to Host Yang Disaksikan

### Oleh Wakil Bupati Kabupaten Flores Timur



Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Penulis, 2024.

## KESIMPULAN

Strategi dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan dalam kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran BAPPENDA Flores Timur maka strategi yang akan dilaksanakan melalui Gerakan Peningkatan PAD atau GEMPAR dengan melaunching Aplikasi *Host to Host* bersama Kantor Pertanahan dengan pola Intensifikasi PBB P2. Sistim ini dilakukan untuk menelusuri sertifikat – sertifikat tanah yang telah dikeluarkan dengan Kantor Badan Pertanahan Kab. Flores Timur yang belum mendapatat Nomor Obyek Pajak.

Faktor pendukung yang dapat menentukan keberhasilan dalam penyelesaian isu-isu strategis ini. Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain; didukung oleh SDM yang profesional, berbasis kondisi lokal, mendukung kebijakan desentralisasi fiskal dan akomodatif terhadap dinamika global.

Faktor penghambat dalam pencapaian sasaran diantaranya adalah situasi pandemik Covid-19 yang membuat banyak usaha ekonomi masyarakat lumpuh yang berdampak pada berkurang sumber pendapatan daerah dan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan dengan baik dan

Belum optimalnya pendataan potensi pendapatan dikarenakan sarana dan prasarana yang terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, A.S., Mauleny, A.T., Sayekti, N.W., & Lisnawati. 2017. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pusktaka Obor Indonesia.
- Gunawan, C.I. 2015. *Sistem Informasi Manajemen & E-Government*. Purwokerto: CV. IRDH.
- Komarlah, A., Satori, D. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ma'aruf, Amir. 2022. *Analisis Strategi (Panduan Praktis SWOT, GE-MCKNSEY, SPACE, FFA, QSPM, AHP Menggunakan Microsoft Excel)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mahi, A.K., Trigunarto, S.I. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori & Aplikasi)*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Sasmito, C., Laka, Y.H., Yulita., & Gunawan, C.I. 2020. *Manajemen Kebijakan Sektor Pariwisata*. Purwokerto: CV. IRDH.
- Sasmito, C., Devina, N.I.D. 2020. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. Malang: Unitri Press.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Integensi Media
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang: Media Nusa Creative.
- Berkat, Y.J., Nusa, Y. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pomako Kabupaten Mimika. *Journal Of Economics And Regional Science*. 2. (2): 156-171.
- Gunawan, C.I., Yulita. (2019). Model Strategi Manajemen Kebijakan Publik Sektor Pasar Tradisional Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. *REFERENSI; Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*. 7 (1): 37-45.
- Khususma, P. A., Faletahan, F., Ekayani, M. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang Selatan melalui Sektor Pariwisata. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 7. (2): 15374-15379.
- Kurniawan, R., Primahadi, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*. 5(1): 84-93.
- Mailindra, Wiyan. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*. 3 (1): 1-10.
- Nilawati, Evi. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daaerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur*. 9 (1): 41-60.
- Sabuna, A., Kellen, P.B., Libing, Z. S. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Wilayah (Pad) Dari Sektor Pajak Hotel Dan Rumah Makan Di Kota Kupang Pada Era Pandemi Covid-19. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 9. (1): 170-181.
- Sanga, K.P., Jaeng, W.M.Y. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur. *Jurnal on Education*. 5 (2): 2721-2728.
- Sudiarta, G. M., Sudarmana, I. P. A. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*. 9 (4): 1338-1357.



- Sulistiyowati, E., Kasih, M.W.R. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 6 (2): 11869-11876.
- Walid, Farid. 2022. Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah pada Enam Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. (Tesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin: Makassar.